

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327550720>

Greening The Public Administration

Article · September 2018

CITATIONS

0

READS

1,940

1 author:



[Syakrani Rony](#)

Universitas Lambung Mangkurat

5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Building the next paradigm of public administration [View project](#)



Greening the public administration [View project](#)



Greening the Public Administration

From Anthropocentric to Eco-Theocentric Worldviews

“... are we humans the only beings of value in the world? Does the world exist only for our benefit?

- Robyn Eckersley, 1992

Mengapa Memilih Ini?

Terasa semakin sangat sepi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat membincang karya pemikir-pemikir genius “tempoe doeloe” semisal karya Joseph LaPalombara, Fred W. Riggs, Edward W. Weidner, Montgomery, Heginbotham, dll. Mereka, barangkali, sudah tidak lagi mengenal siapa mereka, karena pemikiran, teori, dan buku-buku mereka sudah dianggap *jadul*; kono. Telinga, lisan, pena, dan jari-jemari mereka bahkan sudah lebih akrab dengan konsep-konsep baru seperti Old and New Public Administration, New Public Management, New Public Service, Reinventing Government, Innovative and Dynamic Governance, Political Economy, dll. Itu pun kalau mereka memahaminya.

Tidak salah; tetapi harus diingat, konsep-konsep atau teori-teori baru ini, disadari atau tidak disadari, menghalau semakin jauh perhatian kita dari perspektif ekologis dalam ilmu administrasi negara, yang dulu justru menjadi fokus dan keasyikan ilmiah pemikir-pemikir genius tersebut. Wajar bila tema seminar nasional hari ini adalah “Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perspektif Ilmu Administrasi Publik.” Mengapa tidak, misalnya, “Ilmu Administrasi Publik dari Perspektif Lingkungan Hidup.”

Apakah pilihan tersebut hanya kebetulan saja, tidak sepenuhnya sadar, atau justru menggambarkan telah terjadinya involusi pemikiran dan loncatan-loncatan besar pemahaman teori yang ahistoris, atautkah sekadar apa?

Kalsel Kini Darurat Ruang: Berkiblat Kemana?

Banjarmasin, Kompas Senin, 13 November 2017. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel sejak 2014 kurang ... Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kalsel dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah IKLH nasional ... Direktur Walhi Kalsel ... mengatakan, tutupan hutan di Kalsel sudah kritis, karena separuh ruang wilayahnya dibebani izin pertambangan dan perkebunan. Ruang wilayah Kalsel seluas 1,24 hektar (32%) telah dibebani izin tambang dan izin perkebunan kelapa sawit (618.791 hektar; 17%).

Headline harian ini pada hari yang sama berjudul **Merkuri Papar Jutaan Warga.**

Jakarta, Kompas – Hidup jutaan warga di sejumlah wilayah Indonesia terancam akibat paparan logam berat merkuri dari aktivitas pertambangan emas skala kecil. Meski pemerintah telah melarang penggunaan merkuri di sektor ini, penerapannya belum efektif.

Di sebelah kanannya, harian ini memuat laporan Irma Tambunan dan Frans Pati Herin: **Pertambangan, Kilau yang Hancurkan Pangan Kami.**

Berita atau laporan semacam ini bukan hal baru; jamak kita temukan di mana-mana. Peristiwa atau masalahnya senantiasa berulang: Meski pemerintah

telah melarang penggunaan merkuri di sektor ini, [tetapi] penerapannya belum efektif. “Penerapannya belum efektif” harus digarisbawahi, karena langsung terkait erat dengan fokus kajian administrasi negara.

Sudut pandang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perspektif Ilmu Administrasi Publik” akan majal menjelaskan masalah berulang ini, karena sudut pandang ini beserta kekayaan teori barunya – dari NPA sampai dengan NPS dan *Innovative Governance* sekalipun – memang tidak diabdikan untuk menjelaskan masalah tersebut secara khusus dan mendalam. Bila kita periksa dengan cermat, semua teori pendukung paradigma kontemporer administrasi negara¹ – dengan sedikit pengecualian teori-teori pendukung NPM -- menggiring konseptualisasi dan teoresasi (ilmu) administrasi negara ke ranah politik sebagai reaksi keras terhadap tendensi kuat the *silent takeover* (Hertz, 2001) kedaulatan negara oleh *NPM Movement*. Kemudian, teoresasi itu bergeser sedikit ke ranah demokrasi. Celakanya, demokrasi di sini adalah demokrasi yang sudah dijual kepada penawar tertinggi, yakni kapitalisme. Akhirnya, pembelaan/reaksi keras tersebut tidak ada gunanya, karena tidak memiliki kekuatan massif dan berskala global seperti yang dimiliki oleh *The Lord of Poverty* (Hancock, 1989), yakni *Transnational Corporations* (Korten, 2015) dan Lembaga-lembaga utama Dunia, seperti PBB dan Bank Dunia.

Terobosan Fredrickson dkk yang mendobrak kemapanan teori-teori (para teoritisi) administrasi negara lama,² yang kemudian dikelompokkan ke dalam paradigma OPA, sempat menyingkap sebuah ekspektasi teoretik baru. OPA yang menurut mereka sangat *value-free* tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial nyata dan kontemporer saat itu, khususnya masalah ketidakadilan (ketimpangan sosial).³ Ilmu administrasi negara tidak boleh lagi *value-free*, tetapi harus *value-laden*. Namun sayang, keniscayaan untuk *value-laden* hanya dicukupkan untuk menyentuh dimensi ke-kini-an dan ke-disini-an ketimpangan/ketidakadilan sosial; ia gagal menggarap *cross-generational social inequality*

¹Dalam naskah ini, saya menulis istilah administrasi negara dan administrasi publik secara bergantian untuk menyebut subyek yang sama, walau saya lebih cenderung memilih konsep administrasi negara sebagai konsep yang lebih tepat. Tentang hal ini, tolong pahami kembali pembelaan (a) Denhardt and Denhardt (2007); (b) Durant (2014).

²Sampai di sini kita harus membedakan antara paradigma klasik dan paradigma kontemporer administrasi negara. Snellen (2014) justru menawarkan klasifikasi paradigma yang lebih kontemporer.

³Periksa Frederickson (2010); Johnson and Svara. (2011).

sebagaimana yang dimaksudkan oleh Komisi Brundland, *Our Common Future*, bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. NPA yang mereka gagas lebih sibuk membahas *distributive and procedural aspects of social inequality*.⁴

NPM lahir di dua tempat, di Inggris dan Amerika Serikat. Walau mengusung pesan yang berbeda, tetapi mereka dipertemukan di kilometer yang sama: *business-like public administration*. Tokoh politik NPM di Inggris adalah Margaret Thatcher. Dengan paham *pluralist state*, Thatcher dan para penasehatnya sangat yakin bahwa untuk mengatasi *government failure* dalam menyediakan pelayanan publik yang adil (seberapa banyak warga yang bisa dilayani dan dibantu) dan yang bermutu (seberapa baik pelayanan yang disediakan), *slimming the state*⁵ sebagai implementasi paham di atas adalah solusinya. TINA: *there is no alternative*, kecuali *slimming the state*. Artinya apa? Negara (pemerintah) bukanlah satu-satunya lembaga penyedia pelayanan publik. Bahkan negara/pemerintah dianggap tidak pintar melakukannya. Penyedia lain (*alternative state*) adalah korporasi, yang *nota bene* terbukti lebih berkualitas dalam menyediakan pelayanan publik.⁶ Privatisasi – lalu kemudian lebih dikenal dengan kapitalisasi – pelayanan publik.

Hood⁷ mungkin adalah – mohon maaf – salah seorang pakar NPM yang paling banyak “berdosa” karena secara massif meracuni pikiran banyak orang tentang apa yang dia (mereka) sebut *administrative diseases of the traditional public administration*. Hampir sama dengan orang yang tidak memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk bekerjanya tipe ideal birokrasi ala Weber; kemudian mereka dengan terburu-buru menyimpulkan bahwa birokrasi telah mati, lalu mereka dengan malu-malu menawarkan alternatif lain, seperti *post-bureaucracy model*, padahal dengan malu-malu pula mereka masih mengakui pentingnya mendesain organisasi ala Weber. Dengan propaganda ilmiahnya, Hood cs. mendeklarasikan bahwa NPM *[is for] all seasons* untuk menggambarkan bahwa

⁴Periksa *The Future of Public Administration, Public Management, and Public Service Around the World: The Minnowbrook Perspective*. Dalam buku ini saya juga belum menemukan pembahasan khusus dan mendalam masalah lain, kecuali isu ketidakadilan yang dialami oleh generasi sekarang.

⁵Sebagaimana gula Tropicana Slim yang diduga dapat merontokkan lemak pada tubuh manusia, *slimming the state* juga diperkirakan dapat mengurangi sebanyak mungkin fungsi negara/pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, sehingga lebih bermutu.

⁶Periksa McLaughlin dkk. (2002).

⁷Periksa misalnya Hood (2000).

NPM model bisa diterapkan di semua tempat tanpa hambatan *cross-cultural & time validity*.

Kritik dan penolakan terhadap Hood cs. sangat keras. Denhardt and Denhardt (2004) dengan agak menyindir mengemukakan, para pejuang NPM jangan hanya membahas sebuah perahu, yang negara/pemerintah kerap tidak mampu mengayuhnya (*rowing*) sendiri, tetapi harus mengingat pula siapa pemilik perahu itu sebenarnya. Pemiliknya adalah rakyat.

Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai *customer* yang harus berhadapan dengan korporasi dalam pola relasi *profit-making*. Rakyat adalah warga negara yang jauh lebih tinggi posisinya daripada sekadar *customer*. Karena itu, apa pun alasannya, pemilik perahu itu harus lebih diutamakan untuk dilayani oleh pemegang mandat (lembaga penyelenggara) perahu, yakni negara/ pemerintah. Melayani warga (rakyat, pemilik perahu, pemilik kedaulatan) merupakan kewajiban konstitusional penyelenggara perahu (pemerintah). *Serving, Not Steering*. Dan siapa pun yang ada di sebuah negara, termasuk korporasi asing, harus tunduk kepada pengaturan negara/pemerintah. Durant (2014) dengan tegas mengemukakan, siapa pun dalam sebuah negara harus menjadi pengawal konstitusi dari negara tersebut. Korporasi, sebesar apa pun ia, harus tetap tunduk terhadap semua peraturan per-UU-an yang berlaku di negara itu.⁸

Banyak sekali kritik disampaikan kepada pendukung fanatik NPM; di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Klaim universalitasnya yang sangat eksessif, sehingga mengabaikan keragaman nilai-nilai sosial budaya di sebuah negara.
2. Implikasi ideologisnya yang berbahaya; merenggut kedaulatan negara melalui kuasa diskursif.

⁸*State activism*. Pendapat ini perlu ditekankan, karena, seperti yang dijelaskan oleh Korten (2015), korporasi-korporasi asing, apalagi korporasi raksasa (*transnational corporations*), selain menuntut dihilangkannya hambatan-hambatan berbisnis, mereka juga meminta perlakuan khusus kepada pemerintah dari negara tempat mereka beroperasi. Bahkan, mereka lebih loyal kepada negaranya sendiri daripada negara/pemerintah tempat mereka berusaha.

Kritik yang pertama ditujukan pada gagasan dan teori NPM, sedangkan yang kedua ditujukan pada muatan ideologis NPM.^{9, 10}

Riggs (1964) tidak main-main ketika merumuskan teori masyarakat prismaiknya. Sejalan dengannya adalah Heginbotham (1975). Dia juga sungguh-sungguh dalam merumuskan teori Empat Wajah Birokrasi India. Walau keduanya satu aliran dalam mengembangkan teori-teorinya – *modernism* – tetapi mereka dengan cermat mengungkapkan bahwa faktor budaya sangat berpengaruh terhadap pola-pola ajeg praktik penyelenggaraan pemerintahan di sebuah negara.

Baik Riggs maupun Heginbotham sepakat akan pentingnya reorientasi praktik-praktik *culture-bounded public administration* di beberapa negara berkembang, tetapi mereka hati-hati ketika menyarankan jalan keluarnya: jangan terperangkap lagi pada *mechanistic model of organization*.

Tidak mungkin pakar NPM movement tidak menyadari kehati-hatian Riggs, Heginbotham, dan yang lain, karena ketika sudah terbentuk kesadaran kolektif tentang pengaruh besar faktor budaya terhadap praktik administrasi negara lahir model lain, yaitu *organic model of organization*. Yang terbaca dari *ngeyelnya* gerakan ini untuk menerabas faktor budaya itu adalah gerakan diam-diam penetrasi muatan ideologis gerakan NPM.

Dengan model yang agak beda, tetapi seera, *reinventing government* menjadi *trending discourse* di Amerika Serikat. Kalau di Inggris dengan Margaret Thatcher-nya, maka AS dengan Ronald Reagan-nya, yang dikemudian dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, Clinton dan Al-Gore.

Tidak seperti di Inggris, yang memilih *slimming the state*, AS memilih *strengthening the state*. Kegagalan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang bermutu tidak serta merta harus menyerahkan seluruhnya atau sebagian besarnya pelayanan publik kepada pihak yang disebut *the alternative state* dalam ideologi *the pluralist state*. Kitab suci aliran *strengthening the state* adalah *reinventing government* yang ditulis oleh Osborne dan Gaebler (1993). Mereka dalam bukunya ini merumuskan beberapa ciri ideal pemerintahan setelah

⁹Periksa misalnya Vigoda (2002).

¹⁰Perlakuannya kepada rakyat sebagai *customer* tidak sesuai dengan hak-hak konstitusional warga.

pemerintahan itu di-reinvent: ditemukan kembali jati-dirinya. Ciri-ciri ideal ini kemudian menjadi prinsip yang mendasari *strengthening the state*.

Buku *Reinventing Governance* bersifat deskriptif, tidak menyediakan cara-cara (strategi) untuk melakukan *strengthening the state* dengan prinsip-prinsip tersebut. Buku yang ditulis bersama Plastrik (1997), menjelaskan strategi mewujudkan pemerintahan dengan jati diri yang sudah ditemukan kembali. Strategi ini dikenal dengan *The Fives Strategies for Reinventing Government, the Five C's*.

Corak beda *slimming* dari *strengthening the state* dapat dipahami dengan baik dalam buku itu. Intinya, bila ada pelayanan publik tertentu yang memang negara (pemerintah) tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri, maka pemerintah tidak boleh memaksakan diri memainkan peran *rowing*, tetapi tidak berarti pula pemerintah/negara pasif. Sebaliknya, ada pelayanan publik tertentu yang memang mau tidak mau harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Tentang penerapan the Five C's ini, pendapat Fukuyama (2004) menarik untuk dikemukakan. Bagi dia, bukan banyak-sedikitnya fungsi negara yang harus dipersolkan, tetapi kapasitas negara atau pemerintah untuk menyelenggarakannya. Fukuyama sejalan dengan para pendukung *reinventing government* yang tidak setuju dengan *slimming the state*. AS harus melakukan *state building* dengan meningkatkan kapasitas pemerintah agar mampu menyediakan pelayanan publik yang bermutu kepada warganya.

Osborne berusaha keras untuk menjelaskan, konsep *entrepreneurial spirit* yang terdapat pada judul bukunya bukanlah komersialisasi/kapitalisasi total pelayanan publik. Tetapi, usahanya nampaknya gagal, karena kekuatan yang lebih besar – World Bank – berhasil mamadukan semua teori dan pemikiran pendukung *slimming the state* dan *strengthening the state* dalam sebuah konsep baru, yaitu *governance*. Di sinilah dua mazhab NPM bertemu kembali pada kilometer berikutnya. Era *governance* mengakhiri apa pun yang bernuansa *government*. Administrasi Negara sebagai terjemahan *Public Administration* diganti dengan Administrasi Publik. Konon, konsep publik tidak hanya mencakup *state sector*, tetapi juga bentang kelembagaan lain, yaitu *private and social sector*. Yang sangat mengherankan, posisi bentang kelembagaan ini bersifat dinamis: suatu ketika *state sector* ada di atas, tetapi pada tempo yang lain, *private sector* berada di atas;

gantian mengendalikan sektor-sektor di bawahnya. Dinamika atau pergeseran itu justru dinilai *good*, sehingga secara komposit ia disebut *good governance*.

Lintasan perkembangan teori administrasi negara di atas bukan sekadar sebuah lintasan pemikiran atau wacana biasa, tetapi menurut Abrahamsen (2000) merupakan penghalauan ingatan dan kesadaran kolektif kita tentang urgensinya *government*. Kita lalu semakin lebih familiar dengan konsep *govenance* daripada *government*, walau sering harus *governance without government*.¹¹ Inilah yang menurut dia menjadi cara lain mendisiplinkan demokrasi (*disciplining democracy*) agar dinamika pergeseran posisi *state, private, and social sector* dalam *good governance* tidak terganggu oleh tatanan demokrasi, sehingga ia semakin tak terasa menggerogoti kedaulatan negara, hak-hak rakyat, kebebasan ilmiah, kemandirian dan otoritas pemerintah, dan bahkan justru terasa kian demokratis.

Dengan demikian, sebenarnya semakin kita tidak kritis terhadap OPA, NPA, NPM, dan NPS, maka semakin tidak tersisa lagi dari kemandirian ilmiah kita sebagai komunitas akademik, dan kian tergeroti pula kemandirian politik sebagai sebuah bangsa. Lalu, dengan perspektif yang kian terdisiplinkan oleh gerakan NPM dan segala yang terbaru darinya, kita memahami masalah lingkungan hidup dari administrasi negara. Pertanyaannya, ilmiahkah? Produktifkah?

Disorientasi Kiblat Teori

Mengubah secara radikal kiblat teori administrasi negara dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (lahan basah misalnya) akan sangat membantu. Cara ini mensyaratkan sekurang-kurangnya empat prakondisi.

Pertama, tidak cepat lelah untuk mengikuti perkembangan paradigma disiplin ilmu kita sendiri dan ilmu lain, yang tentu saja membutuhkan akses yang lebih luas ke sumber-sumber ilmu pengetahuan, yang dibarengi dengan kemampuan memahami teks-teks berbahasa Inggris yang makin memadai.¹² Kedua, pemahaman yang tepat tentang perubahan respon-respon praksis terhadap masalah lingkungan hidup.

¹¹Periksa Rosenau and Czempiel (2000).

¹²Yuk ... kita memanfaatkan tunjangan fungsional & serdos kita untuk memenuhi prakondisi ini.

Ketiga, pemahaman tepat tentang mazhab-mazhab teoretisasi hubungan manusia dengan lingkungan hidup; *human ecology*. Keempat, memposisikan perubahan paradigma atau teoretisasi tentang administrasi negara ke dalam kerangka perkembangan respon-respon praksis dan *human ecology* tersebut; bukan sebaliknya. Pembahasan respon-respon praksis terhadap masalah lingkungan hidup dari Ife (2002) sangat membantu.

Ife mengemukakan, respon-respon praksis manusia terhadap masalah lingkungan hidup seperti pemanasan global, limbah beracun, polusi udara dan air, *top-soil degradation*, penggurunan (*desertification*), efek rumah kaca, dan penggundulan hutan (*deforestation*) terbagi menjadi dua mazhab besar, yaitu *environmental responses* (ER) dan *green responses* (GR). Dua mazhab ini dibedakan berdasarkan pandangannya terhadap the existing social, economic, and political order, yakni sistem besar yang mengendalikan ekonomi politik bangsa: kapitalisme atau neo-liberalisme.

ER dibangun di atas keyakinan kuat bahwa sistem besar tersebut masih fungsional untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dan kehidupan manusia. Terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup tidak selalu meniscayakan digantinya sistem besar itu dengan sistem baru. Cukuplah masalah itu diatasi dengan cara-cara yang paling sesuai dengan masalahnya, seperti reforestasi, revegetasi, pengembangan masyarakat, dan bentuk-bentuk lain.¹³

GR sebaliknya; respon praksis ini tidak mau terjebak janji/mantra palsu kapitalisme: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, janji kemakmuran di masa mendatang dengan ketimpangan sosial dan eksploitasi lingkungan hidup (SDA) sekarang; menolak solusi *quik-fix*, jangka pendek, dan artifisial. Capra (1982) mengaitkan masalah lingkungan hidup dengan konteks makro terbesarnya, yaitu krisis persepsi; persepsi tentang realitas hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Menurut dia,

“I have come to believe that today our society as a whole finds itself in a similar crisis. We can read about its numerous manifestations every day in the newspapers. We have high

¹³ER mempunyai dua fokus perhatian. Pertama, berusaha mengatasi masalah lingkungan hidup dengan cara mengembangkan solusi yang bersifat *discrete*: khusus, terpisah dari konteks masalah yang lebih luas, terutama sistem besar penyebabnya. Kedua, mengembangkan solusi masalah lingkungan hidup berdasarkan kerangka keilmuan, politik, ekonomi, sosial, dan nilai-nilai budaya dominan yang ada; ia tidak berusaha “keluar” dari kerangka tersebut.

inflation and unemployment, we have an energy crisis, a crisis in health care, pollution and other environmental disasters, a rising wave of violence and crime, and so on. The basic thesis of this book is that these are all different facets of one and the same crisis, and that this crisis is essentially a crisis of perception.”

Karena itu, tawaran ER tidak memadai; masalah lingkungan hidup (krisis ekologi) merupakan masalah yang sangat berat. Solusi *quick-fix*, *discrete*, dan jangka pendek tidak akan membebaskan umat manusia dari kepungan masalah lingkungan hidup. GR mengembangkan banyak alternatif solusi dengan ragam penyebab utama kerusakan lingkungan hidup (Tabel 1).

ER lebih simpel, tetapi tak menawarkan solusi mendasar. GR agak rumit dan barangkali sulit, tetapi mendasar, tertuju langsung ke pokok penyebab masalah. Masalahnya adalah, di antara dua respon praksis ini, ilmu administrasi negara dan komunitas ilmunya akan memilih yang mana? Jalan pintas?

Kalau ini pilihan kita, berarti ilmu ini juga akan menjadi bagian dari ilmu-ilmu lain yang mengalami krisis, yang ilmunya juga mengalami krisis persepsi. Pilihan ini hanya akan menjauhkan perhatian ilmu administrasi negara terhadap masalah lingkungan hidup yang diyakini tidak bersumber dari sistem besarnya. Gerakan NPM sangat mendukung cara kerja korporasi, yang nota bene pragmatis, bergaya korporasi, jangka pendek, dan bahkan sangat mendukung ideologi gerakan ini.

NPS agak bagus, terutama bila dikaitkan dengan pembelaannya terhadap eksistensi negara dan kedaulatannya, serta peran pemerintah dalam pelayanan publik. Tetapi, landasan legitimasinya semakin keropos, karena NPS dan pendekatan yang digandrunginya – ekonomi politik [tentu saja setelah demokrasi dijual kepada penawar tertinggi; *the highest bidder*] -- bermudah-mudah membawa masalah lingkungan hidup ke ranah lainnya, ke ranah politik dan pasar. Lalu, masalah lingkungan hidup diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan Boyce (2002):

1. Who reaps the benefits?
2. Who bears the costs?
3. Why are the winners able to impose costs on the losers?

Mekanisme pasar (NPM) diberi tanggung jawab menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan kaidah TINA-nya, misalnya dengan “pemaksaan” pasar

bebas, pengurangan subsidi; NPS menggarap kebijakan-kebijakan sosial, semisal bantuan raskin, kartu sehat, jaminan sosial untuk menekan sisi pengeluaran keluarga miskin akibat privatisasi dan komersialisasi pelayanan publik; korporasi-korporasi menyelenggarakan program pengembangan masyarakat (CD) sebagai kompensasi kerusakan lingkungan hidup yang dialami oleh warga miskin agar mendapat social license dari warga.

Tabel 1 Paradigma Hijau: Menuju Paradigma Pembangunan Yang Santun Kehidupan

Paradigma	Penyebab Utama Rusaknya LH menurut GR	Skenario (Solusi) GR	Penggagas Utama
Berpikir Baru (New paradigm of thinking)	Pandangan Newtonian-Cartesian dan Cara Berpikir Linear	Cara Berpikir Sistemik dan Holistik	Capra, Rifkin, Henderson, Ornstein & Ehrlich
Filsafat Ekologi (Eco-philosophy)	Pandangan Yang Berpusat pada Manusia	Pandangan Yang Berpusat pada Ekologi	Fox, Eckersley, Naess
Sosialisme Ekologi (Eco-socialism)	Kapitalisme	Masyarakat Sosialis	Gorz, Mellor, Ryle, Pepper, Sarker, Luke
Anarkisme Ekologi (Eco-anarchism)	Hirarki, Pemerintah, Birokrasi	Desentralisasi, Kontrol Lokal, Penghapusan Pemerintah Pusat	Bookchin, Thoreau, Marshall
Feminisme Ekologi (Eco-feminism)	Patriarki	Revolusi Feminis, Penghargaan dan Pemberdayaan Gender	Mellor, Salleh, Merchant, Shiva, Plumwood, Warren
Ludisme Ekologi (Eco-luddism)	Teknologi	Teknologi Sederhana & Bersahabat dengan Lingkungan	Illich, Postman, Mander, Bowers
Anti Pertumbuhan (Anti-growth)	Pertumbuhan (ekonomi, penduduk, dan konsumsi)	Masyarakat Tanpa Pertumbuhan	Meadows, Suzuki, Ehrlich
Ilmu Ekonomi Hijau (Green economics)	Teori Ekonomi Konvensional	Ilmu Ekonomi Yang Mendukung Sustainability	Henderson, Dauncey, Ekins, Pearce, Daly & Cobb, Jacobs
Pembangunan Global (Global Development)	Kapitalisme Global, Eksploitasi Selatan oleh Utara	Kesetaraan Global dan Pembangunan Berkeadilan	Trainer, George, Shiva, Latouche, Norgaard
Kapitalisme Spiritual (Spiritual capitalism)	Kapitalisme Yang Loba	Kapitalisme Yang Digerakkan oleh Visi dan Nilai	Zohar & Marshall

Sebenarnya, NPS sempat menjanjikan; ia, karena landasan konseptualnya yang dekat dengan *strengthening & building the state*, menyadarkan kita akan pentingnya pemerintah yang kuat, birokrasi publik independen dan profesional. Di sisi lain, NPM yang berporoskan *slimming the state* lebih kuat mempanetrasi *managerialism* ke dalam *reiventing government*, yang walaupun tumbuh subur di Inggris, tetapi pengaruhnya melampaui batas-batas kedaulatan negara melalui korporasi-korporasi besar di AS yang nota bene sangat menentukan politik dan ekonomi AS. Di ranah dan melalui panetrasi *managerialism* inilah impian tentang pemerintahan yang kuat, independen, dan profesional layu sebelum berkembang. Tambahan lagi, elite politik dan birokrasi yang seharusnya menjadi pejuang realisasi dari *strengthening the state* justru sibuk terlibat dalam ritual *rent-seeking* dan korupsi.

Dalam konteks inilah, NPS, dalam banyak aspek, setali-tiga-uang dengan NPM. Berkiblat ke teori dan paradigma NPM dan NPS – apakah kita memahami apalagi tidak memahami jejak historis, teori-teori pendukungnya, muatan-muatan ideologisnya, dan bagaimana ia meracuni pola pikir kita, yang berarti pula kita ada di kubu ER – akan menyebabkan kita gagal-gagal paham tentang NPM dan NPS, yang kemudian menghasilkan sesat-sesat pikir tentang hubungan antara ilmu administrasi negara dan lingkungan hidup. Kita tidak akan pernah ber-*tawadhu*’ membiarkan ilmu kita dipahami dari sudut pandang ilmu lain, tidak mampu memahami masalah sosial dari sudut pandang ilmu kita – administrasi negara – dengan baik, karena tertinggal memahami ilmu sendiri dan perkembangan ilmu lain. Pemikiran yang mendasari pilihan tema seminar kita -- Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Perspektif Ilmu Administrasi Publik -- ada di antara kemungkinan yang mana? Kiblat teori yang jelas atau justru disorientasi?

Sesat-Sesat Pikir?

Cogito ergo sum! Renè Descartes, bapak sains modern. Hidup antara 1596 – 1650, tetapi sesat pikirnya serta dampak negatifnya terhadap pemahaman kita tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup masih terasa sampai sekarang. Sains modern dibangun di atas beberapa doktrin.

Pertama, reduksionisme-atomisme. Doktrin ini mengajarkan bahwa setiap benda, termasuk semesta, terdiri atas bagian-bagian atau terbentuk dari blok-blok bangunan dasar materi. Memahami bagian-bagian dianggap menghasilkan

pengetahuan atau pemahaman yang mewakili hakikat keseluruhan. Kedua, mekanistik-determinisme. Doktrin ini mengajarkan, semesta merupakan sebuah mesin raksasa yang tak bernyawa dan bersifat statis. Rumusan di bawah ini tentang semesta sebagai mesin yang deterministik dengan sangat baik menggambarkan doktrin kedua Sains Modern.

“The universe resembles giant clockwork set in motion by a master clock maker at the beginning of creation and left to run down with times as its spring unwinds. In short, we live in a dead and wasting universe. Matter is the only reality, and the whole is no more or less than the aggregation of its parts. By advancing our understanding of the parts through the reductionist processes of science, we gain dominion over the whole and the power to bend nature to our ends.”

Ketiga, *objectivism*. Doktrin ini mengajarkan, obyektivitas pengetahuan hanya akan diperoleh bila manusia menjaga “jarak” atau “terpisah” sama sekali dengan alam/semesta, atau yang diamati. Pengetahuan yang diperoleh seperti ini akan terhindar dari sangkaan bahwa ia adalah hasil konstruksi mental manusia. Secara metodologik, cara kerja sains seperti ini disebut paradigma positivistik-deterministik, yang banyak diterapkan dalam ilmu alam, *hard science*.

Dalam keterpisahan pengamat dengan yang teramati (*positivism paradigm*), manusia sebagai pengamat menganggap dirinya sebagai *the self* (baca: diri yang sempurna), sedangkan selain dirinya disebut sebagai *the others*. Ini kemudian membidani lahir dan berkembangnya sebuah paham tentang manusia dengan hubungan alam semesta, *anthropocentrism*, sebuah paham yang menganggap hanya manusialah sebagai *the self*, sedangkan yang lainnya, termasuk alam, adalah *the others*: manusia bebas menggunakan alam, lingkungan hidup (SDA) dengan cara apa saja dan untuk keperluan apa saja, termasuk untuk memenuhi kerakusannya.¹⁴

Eco-centrism hadir dengan pemahaman baru tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Catton dan Dunlap (1978), Dickens (1992) merumuskan perbedaan antara anthropocentric dan ecocentric worldview sebagai berikut:

¹⁴Penerapan *anthropocentrism* meluas pada pemahaman hubungan antara lelaki dan perempuan. Lelaki diposisikan sebagai *the self*, sedangkan perempuan sebagai *the others*. *Feminist* memahami kekerasan lelaki terhadap perempuan sebagaimana bebasnya manusia mengeksploitasi SDA, yang secara filosofis berasal dari hubungan *the self* (lelaki) dan *the others* (perempuan) dalam pola hubungan subordinasi, yang *patriarchal*.

Anthropocentric worldview

- Manusia secara hakiki berbeda dari makhluk lainnya berbeda. Karena itu, manusia bisa mendominasi makhluk lain.
- Manusia menentukan nasibnya sendiri. Ia dapat memilih tujuannya sendiri dan belajar melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- Alam dan sumberdaya melimpah, yang menyediakan kesempatan tak terbatas bagi manusia.
- Sejarah manusia adalah sejarah tentang kemajuan. Untuk setiap masalah pastilah ada solusinya. Kemajuan itu tak akan pernah berhenti.

Ecocentric worldview

- Manusia seperti makhluk lainnya; ia organism hidup yang membutuhkan makhluk lainnya.
- Alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari manusia.
- Alam terbangun secara sosial. Manusia selalu mengubah alam. Untuk mengubah alam, manusia mengubah dirinya sendiri.
- Di bawah kapitalisme, alam dikuasai dan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Manusia sering terasingkan dan menjadi asing bagi alam tempat dia bekerja. Kerap ia teralienasi dari sesama.

Pergeseran antroposentrik ke ekosentrik berimplikasi sangat kuat pada seluruh tatanan keilmuan, misalnya, tentang konseptualisasi dan teoretisasi hubungan antar-manusia, manusia dengan alam semesta, pemerintah dengan rakyat, antar-sains, dan sains dengan manusia. Sekaligus, pergeseran itu, menghadirkan tantangan baru bagi para akademisi, ilmuwan, dan mahasiswa, khususnya komunitas akademisi administrasi negara, untuk menetapkan kembali *focus of study*-nya.

Ostrom (2008) mengirim sinyal awal tentang bagaimana komunitas ilmuwan dan akademisi administrasi negara di AS terlambat merespon pergeseran tersebut. Sinyal ini melengkapi banyak kalangan yang sudah lama ragu apakah administrasi negara telah mencapai *normal science* atau sekadar bagian ilmu politik¹⁵ dan sekaligus keprihatinannya terhadap pemikiran dikotomis politik-administrasi saat itu. Kalau Fredrickson dkk. resah terhadap abainya ilmuwan administrasi negara terhadap masalah sosial, maka Ostrom (2008), Ostrom (1990) dan Ostrom dkk (2002) resah terhadap abainya ilmu administrasi

¹⁵Pertanyaan apakah yang tepat adalah theories in public administration atau theories of public administration? menggambarkan keraguan ini.

negara terhadap perkembangan pemikiran, model, dan paradigma baru hubungan manusia dan lingkungan hidup. Melalui karyanya, Ostrom (2008) memprovokasi komunitas ilmuwan untuk menggeser fokus kajian ilmu administrasi negara keluar dari preskripsi ortodoksnya, dari sekadar efisiensi organisasi (*organizational efficiency*) ke isu-isu yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan bersama (*public goods*). Ostrom (1990) dan Ostrom dkk. (2002) mempertegas lahan baru yang harus digarap oleh komunitas ilmu ini, yakni isu-isu mutakhir lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan tata-kelola sumberdaya milik bersama (*governance of the commons*)¹⁶ dan pengembangan institusi untuk tata-kelola tersebut. Dalam kitabnya, Ostrom dkk. mengemukakan, kualitas tata-kelola milik bersama (*governing the commons*) amat menentukan apakah *the commons* akan menjadi *tragedy of commons* atau *comedy of commons*.

Barangkali, pasca seminar nasional kali ini kita harus memahami lebih serius teori *governance of the commons* agar kita mulai terbiasa melakukan adaptasi teoretisasi administrasi negara dengan perspektif isu-isu lingkungan hidup berserta perkembangan paradigma-paradigmanya agar kita mulai paham bahwa pergeseran antroposentrik ke ekosentrik sangat kuat implikasinya pada teoretisasi administrasi negara.

Terkait dengan pergeseran tersebut, ada baiknya kita juga mulai merintis pengembangan *green public administration*, *green policy*, *green governance*, dan lain-lain. Ekonomi dan ilmu politik sudah merintis teori hijau sebagai respon terhadap makin kuatnya *green responses* (GR), baik secara keilmuan maupun kemanusiaan, dibandingkan ER. Karya-karya fonomenal berparadigma GR sudah mulai meluas publikasinya, misalnya, *The Great Turning* dan *Change the Story* oleh David Korten.¹⁷

¹⁶Kita bisa melakukan konseptualisasi dan teoretisasi administrasi negara tentang lahan basah melalui pemahaman teori *governance of the commons*.

¹⁷Ada baiknya pula kita terus mengikuti perkembangan pemikiran Korten dan kawan-kawan. Perlu diingat, dia adalah seorang pakar manajemen pembangunan dan administrasi negara yang pernah menjadi konsultan Bank Dunia di negara-negara berkembang. Adaptasinya yang cepat dengan isu-isu lingkungan hidup, sehingga dia termasuk orang disegani di kalangan komunitas ilmuwan dunia.

Ecocentric Praxis of Public Administration¹⁸

Buaya sadar betul bahwa burung kecil yang mematuk-matuk kotoran di mulutnya secara rutin sangat penting bagi dirinya. Ini kesadaran ekologis yang Allah berikan kepada setiap makhluk agar tidak bermudah-mudah memangsa sesama makhluk. Buaya tidak memiliki tangan untuk menggosok gigi dan membersihkan mulutnya. Bagi buaya, semua yang tersisa di mulutnya adalah kotoran, tetapi bagi burung tidak; ia sesuatu yang berharga. Rasa saling membutuhkan Allah tanamkan pada makhluk sekaliber hewan sekali pun. Buaya tidak butuh kotoran; ia ingin mulutnya bersih. Itulah kebutuhan buaya.

Burung butuh makanan, butuh rezeki. Dan Allah tunjukkan, salah satu rezeki itu ada di mulut buaya. Di sisi lain, Allah juga meng-install rasa kasih sayang di hati buaya, sehingga ia tidak memangsa burung yang berjasa dalam hidupnya.

Itulah kesadaran *ecocentric* buaya dan burung; mereka hidup dalam sesuatu tatanan kosmik yang sarat dengan pesan-pesan ekologis. Sesama makhluk harus ada rasa saling membutuhkan, ada rasa kasih sayang, yang dengannya lalu kehidupan berlangsung harmoni dan *sustainable*.

Memang selalu akan ada hewan predator, hewan pemangsa, tetapi mereka memangsa hewan lain dalam batas-batas kebutuhan mereka, bukan untuk keserakahan mereka. Maka, Harimau memangsa Kijang yang melintasi daerah kekuasaannya. Tidak dimangsa semua; cukup 1 atau 2 ekor untuk sekadar bisa bertahan hidup dan demi keseimbangan populasi.

Kita, manusia, juga “memangsa” hewan lain; ayam misalnya. Tetapi, baik pada kehidupan hewan maupun manusia, ada tata-kelola memangsa. Untuk manusia, Allah mengatur tentang hewan-hewan yang haram dimakan dan dibunuh. Terhadap hewan yang bisa dibunuh untuk dimakan oleh manusia, Allah pun menetapkan aturan-aturan mainnya. Karena itu, walau alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia bukan berarti kita sehendaknya dalam memanfaatkan ciptaan Allah ini. Tata-kelola memangsa hewan lain pasti Allah berlakukan juga pada kehidupan hewan, sehingga hewan punya “adab” untuk

¹⁸Konsep praxis di sini dibatasi pengertiannya hanya sampai pada “ngilmui” ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing; sebuah usaha untuk mewujudkan *a living science*, bukan *a science for our life* (sekadar mencari hidup dari ilmu yang kita tekuni).

memangsa yang boleh dimangsa dengan cara-cara tertentu yang bisa menjamin ketidakpunahannya.

Itulah kesadaran ecocentric yang Allah instalkan dalam kehidupan makhluk, khususnya dalam hubungan antar-manusia, antara manusia dan hewan, dan mungkin antar-hewan. Ini adalah sebuah kesadaran bahwa sesama makhluk tidak boleh melampaui batas-batas tata-kelola memangsa. Memangsa hanya harus dalam batas-batas kebutuhan, bukan keserakahan, serta sesuai dengan kaidah-kaidah ekologis tertentu.

Human ecology merumuskan prinsip-prinsip ekologi yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan alam semesta, misalnya prinsip *holism*, *diversity*, *equilibrium*, dan *sustainability* (Ife, 2002). Prinsip *holism* dibangun di atas kesadaran filosofis bahwa rusaknya lingkungan hidup disebabkan oleh cara pandang antroposentrik (*anthropocentric worldview*) yang menempatkan manusia sebagai makhluk vis-a-vis makhluk-makhluk lain, termasuk makhluk tak hidup, seperti lingkungan.

Eckersley (1992) menyebut cara pandang ini sebagai *Western Worldview*. Ia harus diganti dengan cara pandang lain, yang menempatkan manusia dan makhluk-makhluk lain sebagai bagian ekosistem yang menyeluruh dengan nilai-nilai primer yang sama sebagai bagian dari ekosistem.

“... human are not treated as special when compared with other living being but rather it is the entire ecosystem which ascribed primary value ...”

Terwujudnya kaidah sebagai bagian dari seluruh ekosistem (*the entire ecosystem*) mensyaratkan sebuah pemahaman bahwa kehidupan manusia dan makhluk lainnya, termasuk makhluk tak hidup, sama urgennya bagi kehidupan ekosistem itu sendiri. Yang satu sangat tergantung pada yang lain dalam sebuah jalinan saling membutuhkan. Dan hal ini sangat tidak mungkin bila ada cara pandang yang mengistimewakan manusia sebagai makhluk yang dominan di atas makhluk-makhluk lainnya, seperti yang diajarkan oleh cara pandang (*worldview*) antroposentrik.

Kureethadam (2017) tidak setuju dengan pendapat yang merujuk krisis ekologi (baca: kerusakan lingkungan hidup) pada *the human roots*, *the historical roots* atau *the technological roots*. Dia mengemukakan, sebab utama krisis ekologi adalah the philosophical roots, yang bersumber dari doktrin Descartes

tentang sains modern, yang berimbas pada penataan relasi antar-manusia, antara manusia dan alam semesta. Doktrin ini menjadi lahan subur-tumbuhnya anthropocentric worldview yang merupakan Western Worldview.

Konsekuensi cara pandang *the entire ecosystem* ini adalah keharusan untuk menelaah masalah-masalah dalam kehidupan manusia dalam perspektif keseluruhan juga. Cara pandang ini menolak solusi masalah yang bersifat *dicrete*, terpisah dari bagian-bagian yang membentuk *the entire ecosystem*. Dan dengan demikian, cara pandang ini sekaligus menekankan pentingnya memperhatikan bahwa tindakan kita memiliki potensi dampak menyeluruh ke bagian-bagian ekosistem (Tabel 2).

Tabel 2. Ecological Principles

Principles	Consequences
Holism	1. Eco-centered philosophy 2. Respect for life and nature 3. Rejection for linear solution 4. Organic change
Diversity	1. Valuing differences 2. No single answer 3. Decentralization 4. Networking & lateral communication 5. Lower-level technology
Equilibrium	1. Global – local 2. Yin – Yang 3. Gender 4. Rights – responsibilities 5. Peace – cooperation
Sustainability	1. Conservation 2. Reduced consumption 3. No growth economies 4. Constraints on technological development 5. Anti-capitalist

Prinsip *diversity* menekankan pada apresiasi terhadap keragaman. Daya hidup sebuah peradaban dan alam semesta tergantung pada keragaman, bukan pada keseragaman. Semakin beragam, semakin kuat ketahanan sebuah ekosistem. Sebaliknya, semakin seragam, maka semakin rentan pula daya hidup sebuah ekosistem terhadap ancaman kepunahan.

Prinsip ini menolak satu model solusi masalah untuk semua masalah (*one best way*). Setiap komunitas memiliki sumber daya lokal (kearifan lokal misalnya), yang dengannya setiap masalah harus dirujukkan solusinya pada kearifan tersebut.

Terkait dengan perubahan sosial, prinsip ini lebih menekankan pada mekanisme adaptasi daripada inovasi. Pada mekanisme adaptasi terdapat potensi yang lebih besar bagi optimalisasi sumber daya lokal (*local wisdom, local culture, local knowledge, local resources, local skill, lokal processes*) dalam sebuah perubahan organik (*organic change*). Sebaliknya, mekanisme inovasi lebih cenderung mengabaikan potensi-potensi kelokalan tersebut dan mengganti segala sesuatu yang lokal dengan yang supralokal.

Komunitas akan tercerabut dari akar budayanya sendiri, karena model perubahan sosialnya bersifat mekanistik. Appresiasi terhadap potensi-potensi kelokalan (*valuing the local*) merupakan dasar konseptual yang esensial bagi pengembangan model *change from below* atau desentralisasi. Kendati demikian, prinsip *diversity* menekankan, kemajuan keseluruhan, *the entire ecosystem*, lebih penting daripada kemajuan pada tiap-tiap bagian. Karena itu, sinergitas antar-bagian (*networking*) menjadi hal yang krusial.

Konsep otonomi daerah, walau diselenggarakan dalam konteks politik desentralisasi, tidak sesuai dengan prinsip *diversity*. Otonomi dalam konsep otonomi daerah mengandaikan bahwa daerah “bebas” melakukan apa saja di wilayah administratifnya, tanpa harus mempertimbangkan dampak ekologis dari kebijakan pembangunan terhadap daerah lainnya.

Prinsip ini sangat mencegah terjadinya ego-regional dan ego-sektoral. Ego-ego ini terjadi lantaran tidak dipahaminya bahwa bagian-bagian dari *the entire ecosystem* tersambung melalui jaring-jaring kehidupan;¹⁹ di antaranya dapat kita amati, tetapi sebagian besar darinya terangkai dalam sebuah hubungan tersembunyi, *hidden connection*.²⁰ Sinergitas antar daerah-daerah otonom pada semua levelnya – level perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan -- merupakan kebutuhan dan agenda mendesak agar setiap daerah otonom mengalami kemajuan yang proposional, bisa saling

¹⁹Periksa Capra (1996).

²⁰Periksa Capra (2002).

memberi kontribusi positif sesama daerah, dan kepada *the entire ecosystem*, yakni kemajuan negara dan bangsa.

Daya tahan *the entire ecosystem* hanya mungkin terjadi bila kemajuan itu bersifat *equilibrium* baik antar-daerah, dan antar-sektoral, maupun antar-aspek kehidupan. Appresiasi terhadap kelokalan harus pula mendorong keterbukaan terhadap aspek-aspek global agar sumberdaya lokal terus membangun tenaga barunya.

Salah satu nilai keseimbangan dipertegas oleh prinsip *sustainability*, yang memberi penekanan bukan hanya pemenuhan kebutuhan dari generasi saat ini, tetapi juga generasi berikutnya. Ini adalah sebuah mekanisme untuk mewujudkan keadilan lintas-generasi.

Ilmuwan, komunitas, dan akademisi ilmu administrasi negara harus bisa mengelaborasi prinsip-prinsip ekologi tersebut ke dalam proses-proses teoretisasi administrasi negara baik dalam pendidikan-pengajaran maupun dalam penelitian. Menanamkan kesadaran ekologis kepada para mahasiswa dan memberi warna cara pandang *ecocentric* dalam teoretisasi administrasi negara, misalnya dalam konseptualisasi dan teoretisasi sinergitas, keadilan lintas-generasi, kebijakan publik deliberatif, *networking*, perubahan sosial organik, dan tema-tema lain yang terkait dengan prinsip ekologi ini, secara tidak langsung mengembangkan kesadaran ekologis dalam cara berpikir dan bertindak calon-calon ilmuwan dan tenaga-tenaga terampil-profesional dalam profesi administrator publik atau manajer pembangunan. Harapannya adalah, ketika mereka menduduki posisi tertentu dalam kehidupan sosial, mereka sudah mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam *eco-centric praxis of public administration*, dan menghindari godaan untuk semata-mata mewujudkan nilai-nilai yang terkandung *anthropocentric praxis of public administration* yang kapitalis dan tidak akrab lingkungan hidup.

Theocentric Praxis of Public Adminitration

Mungkin buaya-burung (hewan) juga memiliki kesadaran *theocentric*. Kita tidak tahu! Mereka tidak sekadar memiliki kesadaran bahwa sesama hewan adalah sesama makhluk. Burung lebih kecil tubuhnya daripada buaya. Tetapi, dengan basis kesadaran ekologis itu, burung tidak dihargai berdasarkan ukuran tubuhnya;

ia dihargai oleh buaya karena ia sesama makhluk.

Kesadaran theocentric lebih tinggi derajatnya daripada kesadaran eco-centric. Pembiaran burung mematok-matok di mulutnya dilandasi oleh kesadaran ilahiyah buaya, bukan saja karena ia sesama makhluk, tetapi ia adalah makhluk Allah. Begitu pula seharusnya yang disadari oleh manusia. Mari kita coba perhatikan firman Allah Swt (QS. Ali Imran: 190 – 191) berikut ini:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٥﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٦﴾

”Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”

Tidak ada yang bathil, tidak ada yang salah, yang sia-sia pada seluruh ciptaan Allah. Ini landasan utama theocentric praxis. Bisa jadi, hanya karena manusia tidak tahu tentang ketidak-bathilan ciptaan Allah itu, lalu mereka memburu gajah demi nilai ekonomis gadingnya, memabat hutan demi nilai-nilai ekonomi pohon-pohonnya; mengeksploitasi SDA demi nilai ekonomi bahan tambang dan mineralnya, dan seterusnya. Padahal, nilai ketidaksia-siaan dari kandungan bumi jauh lebih besar daripada nilai-nilai ekonomisnya.

Sebagai khalifah di bumi, seharusnya manusia merawat nilai-nilai transendental yang terkandung dalam konsep “tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia,” di samping mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk mendayagunakan semua potensi alam untuk kehidupan. Dalam theocentric praxis, sesuatu menjadi mulya nilainya, dan karena itu kita dituntut untuk selalu mengingat Allah dan tersungkur ketika mengingat-Nya, dalam seluruh gerak kehidupan kita (berdiri, duduk, dan berbaring), bukan karena ia memiliki nilai ekonomi, bukan pun karena ia sasama makhluk, tetapi ia adalah makhluk Allah, yang pastinya hanya di tangan-Nya rahasia nilai-nilai mulya dari makhluk hidup tersebut. Jadi, hubungan kita dengan alam semesta, hewan, dan apa pun selain kita, dalam theocentric praxis, harus didasarkan pada kesadaran bahwa semua adalah makhluk Allah yang Dia ciptakan tanpa kebathilan.

Allah Swt tanamkan rasa jijik pada diri manusia kepada hewan-hewan tertentu, misalnya pada Babi dan Anjing melalui hukum haram memakannya. Ini merupakan kebijakan Allah agar terwujud God Governance dalam relasi antara manusia dan alam semesta. Demikian juga, Allah tanamkan rasa takut kepada Harimau, dan rasa sayang kepada Kucing atau hewan-hewan lain. Rasa takut dan benci juga ada pada hewan, lalu Allah lengkapi rasa-rasa itu dengan mekanisme mempertahankan diri atau menyayangi hewan. Itu juga jenis lain dari God Governance agar setiap makhluk tidak melampaui batas-batas governance tersebut, khususnya dalam memanfaatkan seluruh potensi alam. Allah sangat tidak menyukai siapa pun yang melampaui batas.

QS. Ali Imran ayat ke-191 diakhiri dengan munajat manusia kepada Allah agar dilindungi dari siksa api neraka. Ini sebagai ungkapan pengakuan dan kesadaran theocentric bahwa apabila manusia gagal memahami rahasia kesempurnaan penciptaan langit dan bumi, tidak menggunakan akalnya untuk memahami rahasia karya akbar Allah, lalu merusak tatanan kosmik yang di dalamnya ada rasa takut, rasa benci, rasa jijik, dan rasa sayang kepada sesama makhluk, serta hukum halal dan haram, mereka khawatir dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang melampaui batas.

Teoretisasi administrasi negara, khususnya ketika sampai pada kajian kebijakan publik, kepemimpinan, *decision making*, dan tema-tema lain harus mempertimbangan dan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam landasan utama theocentric praxis tersebut ke dalam kurikulum, penilaian kompetensi mahasiswa, riset serta karya tulis dosen dan mahasiswa. Sebagai contoh, *mainstreaming* nilai-nilai spiritual dalam *leadership* beberapa tahun terakhir terus menguat. Kajian-kajian dan buku tentang *servant leadership* atau bahkan *prophetic leadership* sekarang terus membanjiri perpustakaan dan *bookstore*. Komunitas ilmuwan yang menekuni kepemimpinan pernah dikejutkan oleh buku Julian yang membahas *God is My CEO*²¹ atau Ziglar yang membahas *God's Way is Still the Best Way*.²² Bahkan, konsep *good governance* yang diperkenalkan oleh NPM, baik yang berporos di Inggris maupun di AS, sekarang harus menghadapi

²¹Periksa Julian (2001).

²²Periksa Ziglar (2008).

konsep tandinganngnya, God Governance.²³

Di saat *institutional decay* dan *trias corruptica*²⁴ sudah jauh merasuki organisasi-organisasi sektor publik dan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, maka saatnya sekarang kita ambil inisiatif membangun sebuah sains baru administrasi negara yang bernafaskan theocentric praxis. Lahirnya sebuah theocentric praxis of public administration sangat mendesak untuk mencegah meluasnya *institutional decay* dan *trias corruptica*, serta dampak-dampak negatifnya terhadap generasi muda dan masa depan bangsa ini. Tidak cukup hanya dengan Etika Administrasi Negara, yang sangat kering nuansa kesadaran theocentric-nya, tetapi sebuah genre baru ilmu administrasi negara, yakni eco & theocentric praxis of public administration.

Trans-disciplinary Paradigms

Mungkinkah kita punya genre baru ilmu administrasi negara? Sangat mungkin, Insya Allah!

Dulu kita masih berbicara pada level multi-disiplin atau inter-disiplin dalam perkembangan sains. Terjadinya gerak maju dari divergensi ke konvergensi sains melahirkan optimisme baru untuk mewujudkan genre baru tersebut. Ilmu ekonomi sudah lama memulainya, misalnya dengan Greening Economy,²⁵ Greening Financial Sector,²⁶ Greening the Firm.²⁷ Politik, baik sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun sains, juga sudah memulainya, misalnya dengan Greening Society,²⁸ Greening Berlin,²⁹ dan Green Political Thoughts.³⁰ Kapan komunitas pakar (akademisi) Ilmu administrasi negara akan merancang Green atau Greening Public Administration yang di dalamnya menyerap nilai-nilai ecocentric dan theocentric worldview, sehingga akhirnya kita punya genre baru ilmu administrasi publik, yaitu eco & theocentric praxis of public administration?

²³Periksa Hendrawan (2009)

²⁴Mutasi genetika dari trias politica menjadi trias corruptica: Legislatif, Executif, dan Judicatif

²⁵Periksa misalnya Shmelev (2017).

²⁶Periksa misalnya Köhn (2012),

²⁷Periksa misalnya Prakash (2004)

²⁸Periksa misalnya Driessen and Glasbergen (2002).

²⁹Periksa misalnya Lachmund (2013).

³⁰Periksa misalnya Dobson (2000).

Sebagai langkah awal, misalnya, kita coba susun sebuah sketsa sederhana ilmu administrasi negara berparadigma trans-disipliner. Meminjam metodologi yang diterapkan oleh gerakan feminisme, yakni **konstruksi → dekonstruksi → rekonstruksi** (Deutscher, 1997), kita bangun sketsa sederhana itu dengan cara menjelaskan perkembangan paradigma-paradigma ilmu ini sejak yang klasik dan kontemporer sampai ke yang lebih kontemporer, serta teori-teori pendukungnya, kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kekurangan tiap paradigma (konstruksi), lalu kita sterilkan teori-teori, metodologi, konseptualisasi, teoretisasi dalam ilmu ini dari muatan-muatan kepentingan politik-ideologis yang dibangun di atas anthropocentric worldview (dekonstruksi). Misalnya, OPA harus dibersihkan dari keabaian teori-teori utama pendukungnya terhadap common atau public good, yang karenanya Ostrom (2008) menyebut sains ini mengalami krisis intelektual. Kritiknya mirip dengan keluhan Fredrickson dkk. bahwa OPA tidak peduli terhadap masalah-masalah sosial yang berkembang di sekitarnya, lantaran asyik mengejar organizational effectiveness.

NPM, antara lain, lahir untuk menanggapi kritik Ostrom dan Frederickson dengan menggeser fokus utama kajiannya pada masalah-masalah sosial yang menjadi kemaslahatan umum, terutama masalah ketimpangan sosial, selain harus tetap fokus pada nilai strong and clean government. Tetapi sayang, fokus utama paradigma ini lupa bahwa ketimpangan sosial juga bisa terjadi dalam dimensi lintas waktu; sangat bisa jadi ketimpangan sosial yang dapat diatasi saat ini justru melahirkan ketimpangan sosial yang berdimensi cross-generational.

Lahir kemudian NPM dengan doktrin bahwa negara/pemerintah tidak cukup bila hanya memikirkan seberapa banyak warga yang dapat dilayani dan dibantu (outreach government) melalui kebijakan publiknya, tetapi juga harus perhatian pada aspek seberapa baik pelayanan dan bantuan yang diterima oleh warga. Sampai di sini NPM masih sangat positif.

Yang harus disisir dari NPM adalah muatan politik-ideologiknya yang menyusup melalui mainstreaming konsep “seberapa-baik” sebagai pelangkap “seberapa-banyak.” Demikian juga dengan paradigma-paradigma berikutnya; kita koreksi sisi-sisi negatif dan muatan ideologiknya untuk menyusun trans-disciplinary paradigms of public administration.

Lalu, melalui sketsa itu, kita hubungkan perkembangan ilmu ini dengan

perkembangan paradigma ecology, sehingga kita dapat mengidentifikasi area-area kosong (▼ dan ► pada kolom Green Responses atau Deep Ecology). Di area-area kosong itulah kita memikilkan bangunan teoretik dan konseptual eco & theocentric praxis of public administration. Sebagai contoh, saya kemukakan sketsa hipotesis yang saya maksudkan (Tabel 3).

Tabel 3. Trans-disciplinary Paradigms of Public Administration

Public Administration Paradigms	Ecological Worldviews						
	Environment Responses (Shallow Ecology) ³¹					Green Responses (Deep Ecology) ³²	
	GC	MDGs*	SDGs*	CD	AT	EC	TC
OPA	X	X	X	X	◻	▼	▼
NPA	X	◻	◻	◻	◻	▼	▼
NPM	◻	◻	◻	X	◻	▼	▼
NPS	X	◻	◻	◻	◻	▼	▼
IDG	X	◻	◻	X	◻	▼	▼
CG	X	◻	◻	◻	◻	▼	▼
DG	X	X	X	◻	◻	▼	▼
Eco-Theocentric-						►	►

Catatan:

1. OPA=old public administration; NPA=New Public Administration; NPM=New Public Management; NPS=New Public Service; IDG=Innovative-Dynamic Governance; CG=Collaborative Governance; DC=Decentering Governance³³
2. GC=Global Compacts; MDGs*=Program Sosial sejenis Millennium Development Goals; SDGs*=Program Sosial sejenis Sustainable Development Goals; CD=Community Development
3. AT=Anthropocentric Worldview; EC=Ecocentric Worldview; TC=Theocentric Worldview³⁴

³¹Shallow ecology has also been termed light green. It subscribes to four basic principles: rational/human beings are the only life-forms of value; humans can benefit from the environment; if human needs fulfilment is hampered by damage to the environment, then it is a matter for concern; If harming the environment will also harm humans, the environment should be protected.

³²The philosophy of deep ecology originated in the 1970s with the Norwegian philosopher Arne Naess and has since spread around the world. Its basic premises are a belief in the intrinsic value of nonhuman nature, a belief that ecological principles should dictate human actions and moral evaluations, an emphasis on non-interference into natural processes, and a critique of materialism and technological progress. Periksa Katz (2000).

³³Ada sekitar 46 buku utama untuk mendalami paradigma-pradigma ini beserta rumpun teori setiap paradigma.

³⁴Ada puluhan buku utama untuk mendalami tiga pandangan ini.

Sekurang-kurangnya ada dua area kosong “utama” (► pada baris Eco-theocentric public administration) akan menjadi fokus perhatian kita untuk membangun Eco-Theocentric Paradigm of Public Administration. Nilai-nilai utama paradigma terbaru ini diderivasi (diturunkan) dari bangunan konseptual trans-disciplinary paradigms of public administration sebagai hasil koreksi total terhadap kelemahan dan muatan politik-ideologik paradigma-paradigma administrasi negara dan semua rumpun teorinya yang berbasis anthropocentric worldview.

Beberapa nilai pandangan/paradigma tersebut kita juga adaptasi dan elaborasi ke trans-disciplinary paradigms. Sebagai awal melakukan rekonstruksi, adaptasi dan elaborasi dibutuhkan, karena public administration operate in a political context,³⁵ yang di dalamnya ada proses perumusan dan implementasi keputusan politik dan/atau kebijakan publik oleh semua institusi trias politika untuk mewujudkan public interest. Karena itu, trans-disciplinary paradigms sebagian mengelaborasi atau mengadaptasi orientasi OPA (misalnya strong, independent and professional government), sebagian dari NPA (misalnya promoting justice for all), sebagian dari NPM (khususnya quality service, tetapi menolak ajaran sesat TINA dan kapitalisasi pelayanan publik). Sebagian besar dari NPS dan DG (khususnya state activism dan negara berdaulat, serta mengharamkan habitus trias corruptica dan rent-seeking), sebagian CG (misalnya kemitraan dengan sektor-sektor lain dan negara/ pemerintah lain dalam bentuk kolaborasi, bukan privatisasi agar tetap dalam rel res publica, bukan res privata), dan sebagian besar DG (khususnya yang berkaitan dengan going local, community empowerment and public engagement and participation).

Berdasarkan elaborasi orientasi-orientasi tersebut, kemudian kita bangun genre baru ilmu administrasi negara (change the story, change the future)³⁶ melalui metodologi konstruksi → dekonstruksi → rekonstruksi), yakni Eco-Theocentric Praxis of Public Administration dengan memasukkan nilai-nilai dasar Ecocentric and Anthropocentric Worldview. Tentu harus dengan cermat dan ilmiah, sehingga nantinya kita memiliki Green Public Administration (GPA). Profil lengkap GPA tidak mungkin diuraikan di sini, tetapi referensi-referensi yang

³⁵ Periksa misalnya Shafritz, Russell, and Borick (2015)

³⁶Periksa Korten (2015).

diperlukan untuk membangun GPA banyak sekali. Kita pahami dengan cermat bagaimana, misalnya, green economy “menelanjangi” cacat-cacat asumsi ilmu ekonomi klasik dalam menyusun deskripsi dan preskripsi pembangunan ekonomi, bagaimana ekofeminisme menyeterilkan sesat-sesat pikir mitos patriarki dalam merancang hubungan lelaki dan perempuan (the self and the others), bagaimana ekososialisme mendekonstruksi mantra-mantra palsu kapitalisme yang menjadi underlying causes dari ecological crisis, bagaimana eco-theocentric worldviews “menggerayangi” sesat-sesat filosofis anthropocentric worldview yang ternyata mejadi akar-akar fiolosofis krisis ekologi, dan seterusnya (Tabel 4 dan Tabel 1).

Tabel 4. Ilustrasi Metodologi Konstruksi → Dekonstruksi → Rekonstruksi

Dari Anthropocentric Worldview	Ke Eco-Theocentric Worldviews
▪ Shallow Ecology	▪ Deep Ecology
▪ The Empire Community	▪ The Earth Community
▪ The Sacred Money-Market Economy	▪ Sacred Life and Living Earth Economy
▪ The “Not-to-life” Development Paradigm	▪ The “Yes-to-life” Development Paradigm
▪ The Phantom Wealth	▪ The Real Wealth

Ada misi historis yang melatar-belakangi pengembangan Green Public Administration. Di awal naskah ini, saya menyampaikan kerisauan dan sekaligus kerinduan saya kepada karya-karya genius, misalnya, karya Fred W. Riggs. Pakar ini mencurahkan perhatiannya pada profil praksis administrasi negara yang sangat dipengaruhi oleh faktor ekologi. Mengupayakan lahirnya sebuah Green Public Administration berarti meneruskan gagasan-gagasannya ke tingkat teoretisasi dan konseptualisasi yang lebih relevan dengan eranya, sekaligus merupakan apresiasi kita terhadap kontribusi intelektualnya.

Melibatkan komunitas akademisi dan pakar ilmu administrasi negara yang lebih luas (regional dan nasional) merupakan sebuah keharusan, karena usaha ini merupakan megaprojek pengembangan sains. Tetapi, prakarsa ini harus terus digerakkan oleh komunitas kecil akademisi administrasi negara Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Bila prakarsa ini bisa dilanjutkan, maka layaklah Prodi Ilmu Administrasi Publik disebut Prodi Bersinar.

Barangkali ...

Saya tidak mungkin sendiri memaparkan lebih jauh cara pandang *Theo-centrism* (theocentric worldview), Skema di atas, dan apalagi melengkapi bangunan Green Public Administration, tetapi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, ketika kita melakukan pilihan-pilihan teori, model konseptual, dan teoretisasi dalam ilmu kita (baik dalam ranah pendidikan, pengajaran maupun penelitian dan advokasi sosial atau pengabdian masyarakat) ada baiknya kalau kita berusaha mengkaitkan hal-hal tersebut dengan perubahan paradigma, seperti perubahan dari anthropocentrism, ecocentrism sampai ke theocentrism, sehingga ilmu kita lebih semakin dinamis.

Kedua, nampaknya kita baru mampu melakukan teoresasi seperti itu kalau kita punya pemahaman yang tepat tentang paradigma-paradigma tersebut, tentu saja setelah kita menyadari bahwa NPA, NPM, dan NPS sampai dengan DC – sebagian atau seluruhnya – adalah antroposentrik. Tanpa itu semua, kita juga akan gagal paham bahwa *anthropocentric worldview* itu bagian-bagian krusial dari sesat-sesat pikir kapitalisme yang merusak kesadaran kolektif kita melalui kuasa diskursif, khususnya kesadaran kolektif kita dan mahasiswa-mahasiswa kita. Seperti sudah dikemukakan di atas, *anthropocentric worldview* adalah Western Worldview.

Ketiga, sebagai catatan akhir, saya ingin kemukakan teori Phillipson (1922). Dia mengemukakan bahwa sesat-sesat pikir kapitalisme dan imperialisme bahasa (linguistic imperialism) telah merusak kesadaran kolektif kita tentang jati diri kita sebagai bangsa. Maka, kita sejak saat ini harus mulai menyusun argumen bahwa imperialisme sains (scientific imperialism) juga bisa menjadi senjata ampuh rusaknya kesadaran kolektif kita tentang bangsa kita, sumber daya alam kita, dan kelestarian lingkungan hidup kita.

Semoga kita tidak menjadi bagian dari imperialisme sains tersebut, sehingga kita pun akan menolak untuk menjadi imperialis-imperialis kampus yang meracuni mahasiswa dengan sesat-sesat pikir kita. Aamiin!

Referensi

- Abrahamsen, Rita. 2000. Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa. Zed Book, London.
- Boyce, James K. 2002. The Political Economy of the Environment. Edward Elgar, Northampton.
- Capra, Fritjof. 1982. Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. Bantam Books, London.
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. 2007. The New Public Service: Serving, Not Steering. Expanded Edition. M.E. Sharpe, London
- Deutscher, Penelope. 1997. Yielding Gender: Feminism, Deconstruction and the History of Philosophy. Routledge, London.
- Dickens, Peter. 1992. Society and Nature: Towards a Greener Social Theory. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
- Durant, Robert F. 2014. Why Public Service Matters: Public Managers, Public Policy, and Democracy. Palgrave, McMillan.
- Eckersley, Robyn. 1992. Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach. University College London, Londong.
- Frederickson, H. George. 2010 Social Equity in Public Administration: Origins, Developments, and Applications. M.E. Sharpe, London.
- Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press, New York.
- Hancock, Graham. 1989. The Lord of Poverty: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business. The Atlantic Monthly Press, New York.
- Heginbotham, Stanley J. 1975. Culture in Conflict: Four Faces of India Bureaucracy. Columbia University Press, New York.
- Hertz, Noreena. 2001. The Silent Take-over: Global Capitalism and the Death of Democracy. Simon and Schuster Free Press, New York.
- Hood, Christopher. 2000. The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford University Press, London.
- Ife, James. 2002. Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalization. Pearson, Melbourne.
- Johnson, Norman J and James H. Svara (eds.). 2011. Justice for All: Promoting Social Equity in Public Administration M.E. Sharpe, London.
- Korten, David C. 2015. When Corporations Rule the World. Berrett-Koehler Publishers, Inc. Oakland.
- Korten, David C. 2015. Change the Story, Change the Future. Berrett-Koehler Publishers, Inc. Oakland.
- Kureethadam, J. Isaac. 2017. The Philosophical Roots of the Ecological Crisis: Descartes and the Modern Worldview. Cambridge Scholars Publishing, UK.
- McLaughlin, Kate, Stephen P. Osborne, and Ewan Ferlie (eds.). 2002. New Public Management: Current Trends and Future Prospects. Routledge, London.

- O'Leary, Rosemary David M. Van Slyke and Soonhee Kim (eds.). 2010. The Future of Public Administration, Public Management, and Public Service Around the World: The Minnowbrook Perspective. Georgetown University Press, Washington, D.C.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1993. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Plum Book, New York.
- Osborne, David, and Peter Plastrik. 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. Reading, MA, Addison-Wesley.
- Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, New York.
- Ostrom, Elinor, Thomas Dietz, Nives Dolsak, Paul C. Stern, Susan Stonich, and Elke U. Weber (eds.). 2002. The Drama of the Commons. National Academy Press Washington, DC
- Ostrom, Vincent. 2008. The Intellectual Crisis of American Public Administration. 3rd edition. University of Alabama Press, Alabama.
- Phillipson, Robert. 1992. Linguistic Imperialism. Oxford University Press, London.
- Riggs, Fred W. 1964. Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Houghton Mifflin Co, Boston.
- Rosenau, James N. and Ernst-Otto Czempiel (eds.). 2000. Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge University Press, New York.
- Sessions, George (ed.). 1995. Deep Ecology for the Twenty-first Century. Sham-bala, Boston.
- Shafritz, Jay W., E.W. Russell, and Christopher Borick (2015). Introducing Public Administration. 8th edition. Routledge, New York.
- Shmelev, Stanislav (ed.). 2017. Green Economy Reader: Lectures in Ecological Economics and Sustainability. Springer, Switzerland.
- Snellen, Th. M. 2014. Foundations of Public administration: An Essay in its Paradigms. Eleven International Publishing, Portland.
- Spretnak, Charlene and Fritjof Capra. 1986. Green Politics. Paladin Grafton Books, London.
- Vigoda, Eran (ed.). 2002. Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis. Marcel Dekker, Inc. New York.
- William, Catton. Jr. and Riley E. Dunlap. 1978. Environmental Sociology: A New Paradigm. The American Sociologist, 13: 41–9.